



MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026 DAN FKP RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN SUMEDANG

Oleh:

Drs. Bob RF Sagala, M.Si
Kemendagri



PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN



PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBANGUNAN DAERAH MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TELAH DISERAHKAN KE DAERAH SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN NASIONAL, BERDASARKAN PASAL 258 UU NO. 23 TAHUN 2014



Peningkatan & Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan & Pemerataan Daya Saing Daerah

Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja

Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha

Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 59 TAHUN 2024 TENTANG RPJPN TAHUN 2025-2045 (DITETAPKAN TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024)

Visi Indonesia Emas 2045:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

Tema Pembangunan Tahap I RPJPN: Penguatan Transformasi

- Transformasi Sosial** - Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial
- Transformasi Ekonomi** - Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
- Transformasi Tata Kelola** - Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan tata Kelola partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
- Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia** - Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** - Memperkuat ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Sasaran Tahap I RPJPN		2025 Baseline	2029 Target
Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	PDB per Kapita (USD)	5.500-5.520	7.400-7.670
	Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	9,1
	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	21,9
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0	4,5-5,0
	Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,372-0,375
	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	23,3
Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatkan	Global Power Index (ranking)	34 (2023)	29
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,61
Penurunan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,6	62,37
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	77,20

RKPD di Daerah harus disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJPN secara berjenjang melalui RPJMN dan RPJMD. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mendukung pencapaian visi pembangunan nasional yang berkelanjutan, efisien, dan terpadu.

Sumber: Kemendagri Diolah pada 11 Maret 2025

KINERJA ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

RPJPD
(arah kebijakan dan sasaran pokok)

Arah & Tahapan Pembangunan Daerah	I (5)	II (10)	III (15)	IV (20)

Sasaran pokok RPJPD ditandai dgn target indikator makro

RPJMD
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

Sasaran, program dan kerangka pendanaan	I	II	III	IV	V

Sasaran, program dan kegiatan PD	I	II	III	IV	V

Renstra PD
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran)

RKPD
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasarann RPJMD sesuai Tahun Rencana)

Program dan kegiatan Pembangunan Daerah	1	2	3	12

Program dan keg Pemb Daerah	1	2	3	12

Renja PD
(Pencapaian Target Tujuan dan Sasarann Renstra sesuai Tahun Rencana)

DITURUNKAN

DIJABARKAN

DITURUNKAN

DIJABARKAN

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMD PASCA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Ditetapkan pada tanggal 30 September 2014) Pasal 264**
 - RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
 - Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
- UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Ditetapkan pada tanggal 13 September 2024) Pasal 10**
 - Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
 - Periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional.
- Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Ditetapkan pada tanggal 18 September 2017) Pasal 47**
 - Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.



Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029





Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029



Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029, meliputi :

- *Penjelasan tahapan penyusunan ;*
- *Penjelasan tata cara ;*
- *Pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi ;*
- *Jadwal & Timeline ; dan*
- *Hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya (Periodesasi, Penyelarasan, kinerja, cascading dll)*

Sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup **penyelarasan kinerja dan **periodesasinya****

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan *manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, & sistem dinamik.*

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RPJMD

Tahapan Penyusunan RPJMD*

Persiapan Penyusunan (dilaksanakan sebelum tahapan dimulai)

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pembahasan Visi dan Misi Secara Teknokratik

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal dan Penyelesaian Awal RPJMD

Penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD

Konsultasi Ranwal RPJMD kepada Mendagri*/Gubernur*

Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Musrenbang Rancangan RPJMD

Perumusan Rankhir RPJMD

Penyampaian RanPerda RPJMD ke DPRD

Pembahasan Ranperda RPJMD

Evaluasi Ranperda RPJMD kepada Mendagri/Gubernur

Penetapan Perda RPJMD

Sistematika RPJMD sesuai PMDN 86/2017

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. Gambaran Umum Keuangan Daerah
4. Permasalahan dan Isu Strategis
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
6. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah
7. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah
8. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
9. Penutup.

9 Bab



Sistematika RPJMD sesuai dengan Rancangan Pedoman

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Daerah;
3. Visi, misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. Penutup.

5 Bab

PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJPD DAN RPJMN





SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029
MENTERI DALAM NEGERI,

KEENAM

- :
- a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026; dan
 - b. Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026

1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
Pemerintahan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

2

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

3

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

- UU No. 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. RKPD merupakan salah satu dokumen penting dalam siklus perencanaan tersebut.
- UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 263 ayat (4), yang menyebutkan bahwa RKPD disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk menjabarkan RPJMD.
- Permendagri No. 86 Tahun 2017**, yang mengatur secara teknis tentang tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RKPD. Permendagri ini mewajibkan sinkronisasi RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

**RAPERMENTAGRI
PEDUM RKPD TAHUN 2026**

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

**HASIL RAKORTEKBNANG
TAHUN 2025**

**BERPEDOMAN/
REFERENSI**

**VISI, MISI, DAN
PROGRAM KDH TERPILIH**

Urgensi Penyusunan RKPD Daerah

- Penyusunan RKPD sangat penting karena **merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjabarkan RPJMD ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas beserta pagu indikatif anggarannya.**
- RKPD menjadi dasar penyusunan APBD**, sehingga berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan penganggaran tahunan. Urgensinya terletak pada kemampuannya mengarahkan sumber daya secara tepat sasaran, menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta memastikan program pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional, provinsi, dan kebutuhan masyarakat lokal.
- Tanpa RKPD yang tersusun baik, pelaksanaan pembangunan daerah akan kehilangan fokus**, rentan tumpang tindih antar program, dan sulit mengukur kinerja serta capaian pembangunan secara akurat.



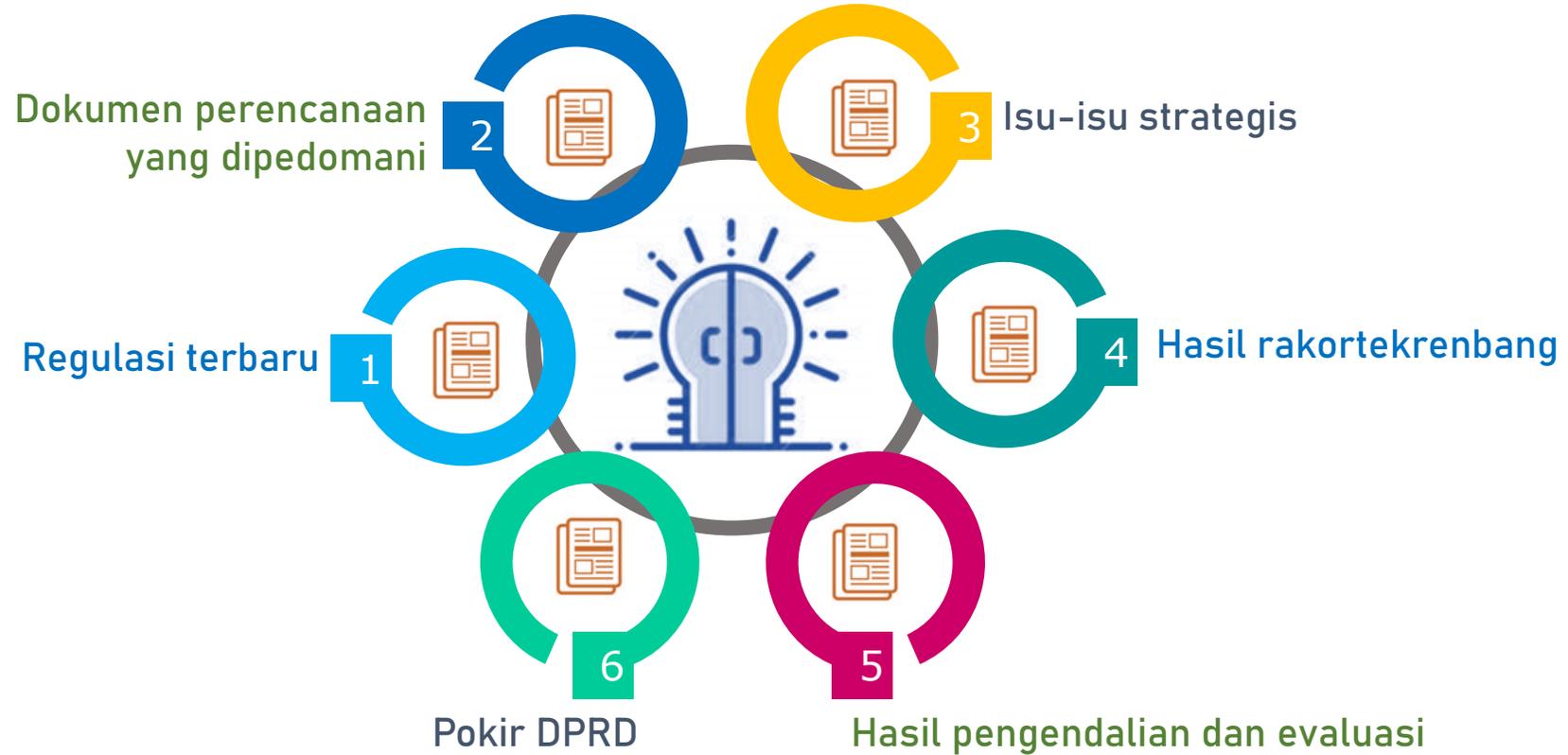
SUMMARY DESK URUSAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2025

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rakortekrentang antara Kemendagri/Bappenas/K/L dan Pemerintah Daerah dalam Desk Urusan Rakortekrenbang Tahun 2025 antarlain sebagai berikut:

- Dukungan masing-masing urusan pemerintahan daerah terhadap **8 Asta Cita yang menjadi prioritas nasional** melalui penentuan 35 *Outcome Prioritas*, 186 indikator *outcome* prioritas pada masing-masing urusan.
- Terdapat **62 Program dan dan 265 Subkegiatan (Provinsi 145 Subkegiatan dan Kab/Kota 120 Subkegiatan)** yang telah ditentukan dan dibahas oleh pemerintah pusat (Kemendagri/Bappenas/K/L) dengan masing masing Provinsi pada desk urusan dalam mendukung pencapaian **35 Outcome Prioritas dan 8 Asta Cita**.
- **Total dukungan subkegiatan** terhadap outcome prioritas dan asta cita dari **seluruh pemerintah Provinsi yaitu 145 subkegiatan** dengan total pagu indikatif Ranwal RKPD 2026 sebesar **Rp 389.569.471.114.270**



YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026

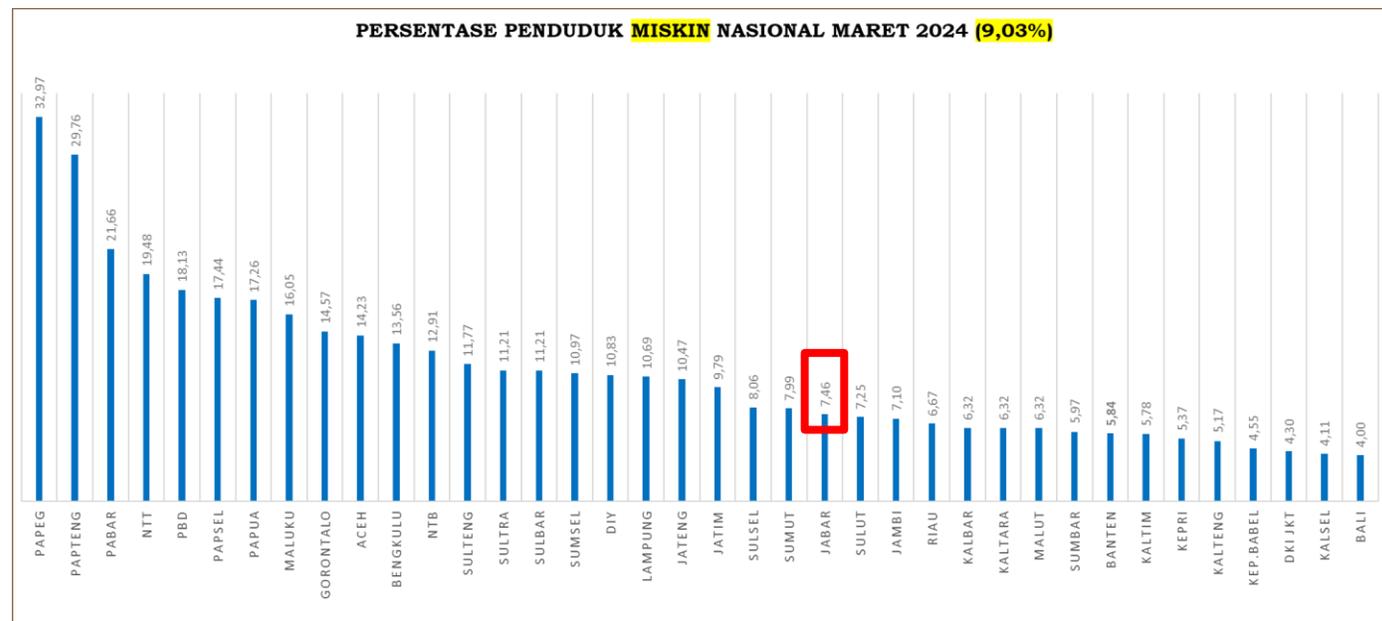


TEMA/ISU NASIONAL YANG HARUS DIPERHATIKAN





PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI DAERAH PERSENTASE KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM NASIONAL PER-MARET 2024



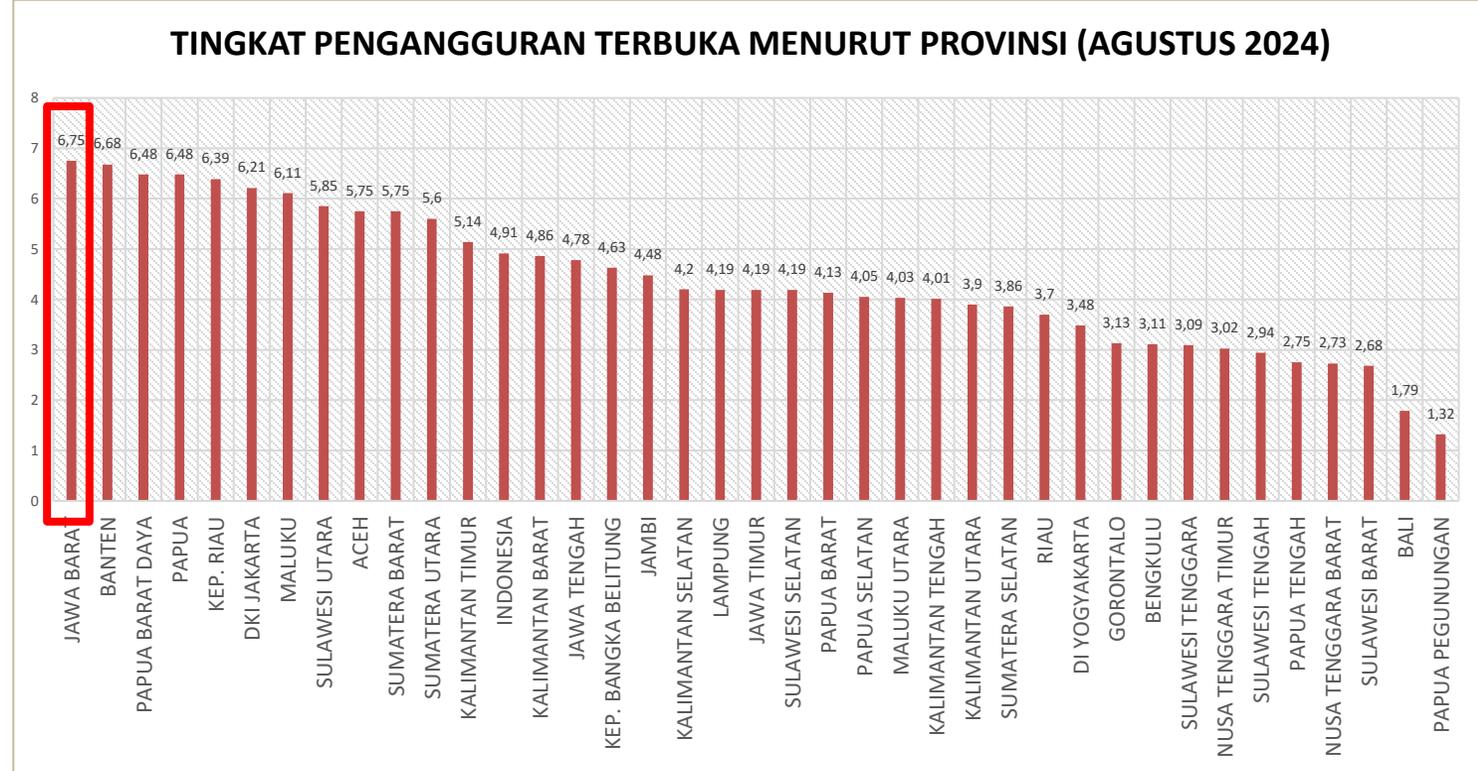
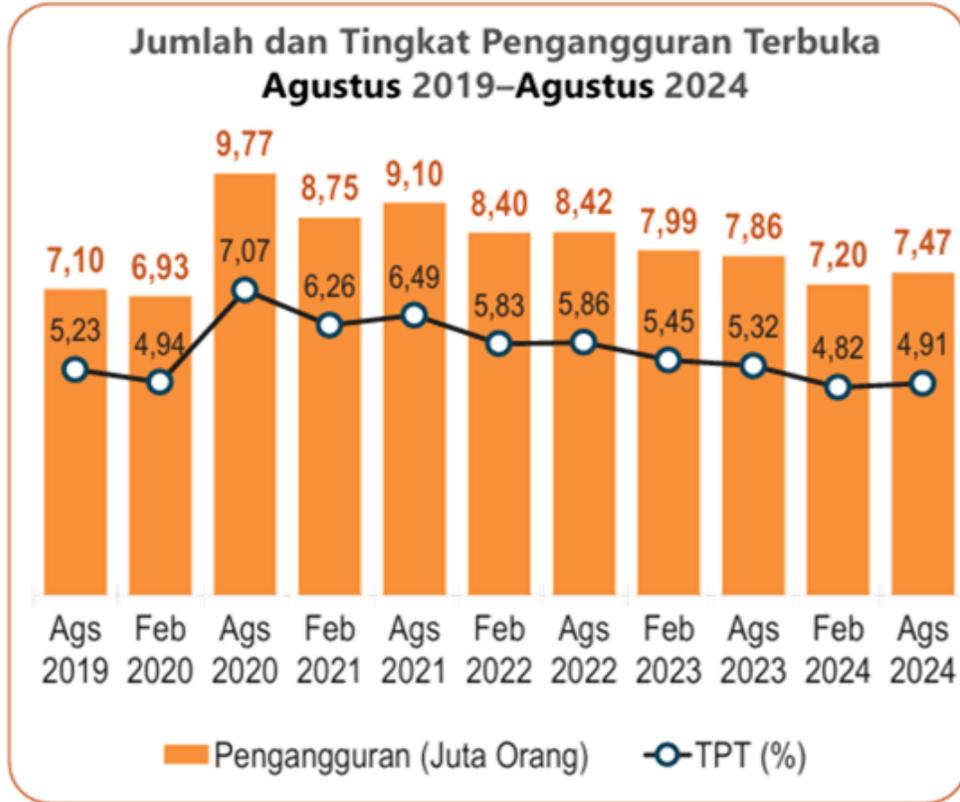
- Secara internasional, **kemiskinan eskترم** adalah masyarakat yang memiliki **pendapatan kurang dari US\$ 1,9 PPP** (*purchasing power parities*).
- Pada tahun 2023, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 11.924 per kapita per hari Rp.362.692 per kapita per bulan.
- Dengan rata-rata jumlah penduduk miskin Indonesia memiliki 4,78 orang anggota keluarga, maka **Garis Kemiskinan Ekstrem Nasional adalah sebesar Rp.1.733.667/rumah tangga miskin/bulan.**

CATATAN:

1. **Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022** Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengamanatkan target angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar **0% pada tahun 2024.**
2. **Target ini lebih cepat 6 tahun** dibandingkan target yang tertuang dalam **Sustainability Development Goals (SSDGs).**
3. Angka kemiskinan ekstrem nasional pada **Maret 2024 adalah sebesar 0,83%** atau **dikategorikan oleh Bank Dunia sebagai near zero.**
4. **Jabar memiliki persentase penduduk miskin sebesar 7,46%, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 9,03%.** Kondisi ini mencerminkan tantangan yang perlu dihadapi dan dicarikan solusi dengan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang bersifat meningkatkan nilai tambah dan ditopang oleh sektor-sektor unggulan seperti jasa perdagangan, pertanian, dan pariwisata serta efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.



PENINGKATAN LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA



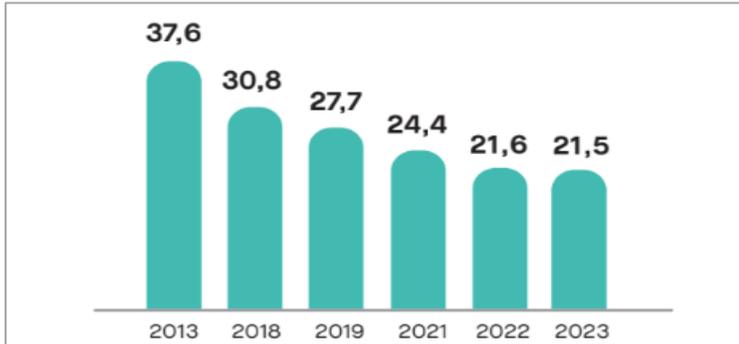
- Pada Agustus 2024, dari **215,37 juta penduduk usia kerja**, sebanyak **152,11 juta merupakan angkatan kerja**, sehingga **TPAK mencapai 70,63%**. **Jumlah pengangguran sebesar 7,47 juta orang (4,91%)** atau turun **0,39 juta dari Agustus 2023**, dan sudah lebih rendah dari sebelum pandemi. Pekerja formal meningkat, terutama buruh/karyawan/pegawai. TPT tertinggi ada di Jawa Barat (6,75%), Banten (6,68%), dan Papua Barat Daya (6,48%), sedangkan terendah di Papua Pegunungan (1,32%), Bali (1,79%), dan Sulawesi Barat (2,68%).
- **Jabar memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,75%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,32%**. Angka ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan relatif belum memiliki lapangan kerja yang memadai dan menyerap tenaga kerja secara optimal, sehingga selanjutnya dapat terus ditingkatkan dengan perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, serta peningkatan kualitas SDM.



PENANGANAN STUNTING

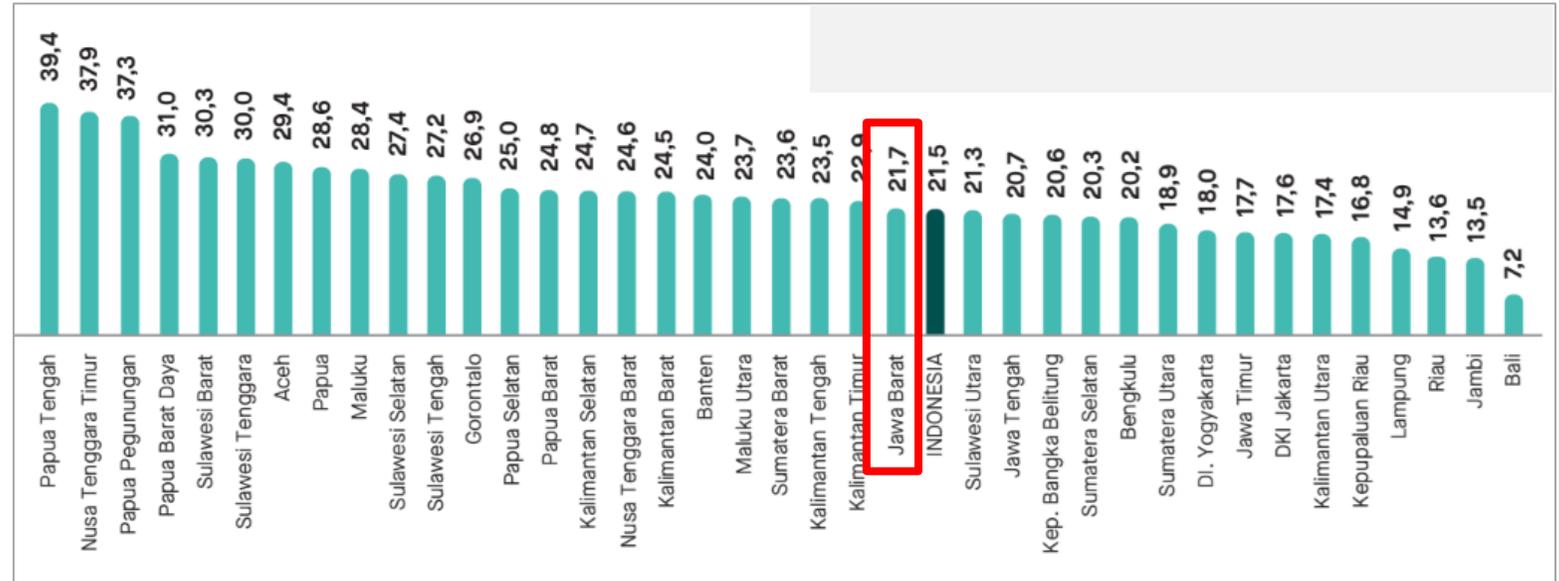
PREVALENSI STUNTING DI INDONESIA DAN PROVINSI DIY

Tren Stunting Indonesia 2013-2023



Berdasarkan hasil SKI 2023 rata-rata nasional mencatat prevalensi stunting sebesar 21,5% dan telah terjadi penurunan prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir (2013-2023). Akan tetapi, *progress* ini belum dapat memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Prevalensi Stunting Tahun 2023 Menurut Provinsi



Target Nasional
Prevalensi Stunting
Pada Tahun 2029

11%



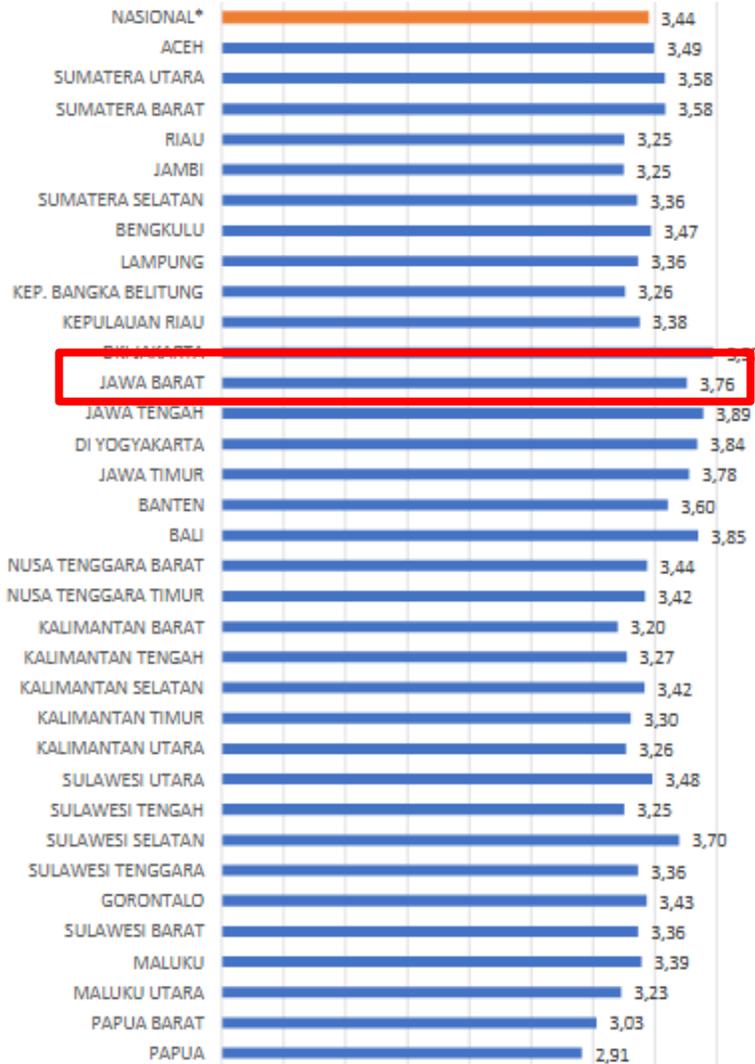
Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

- Dari 38 provinsi di Indonesia, **sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi stunting dibawah angka nasional**. Tiga provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%) dan Papua Pegunungan (37,3%).
- **Jabar mencatat angka sebesar 21,7%**, yang **berada di atas rata-rata nasional sebesar 21,5%**. Hal ini menunjukkan bahwa **masih terdapat stunting yang menjadi tantangan di Jabar**. Upaya percepatan penurunan stunting masih perlu diperkuat, terutama melalui intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat.



PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

NILAI DAYA SAING PER PROVINSI DI INDONESIA DAN PROVINSI DIY



Indeks Daya Saing Daerah dapat **memberikan gambaran umum terhadap kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi sumber daya secara optimal** demi kesejahteraan masyarakatnya



- **14 Provinsi mempunyai nilai daya saing diatas nasional yaitu > 3,44 poin.** Jumlah ini menurun dibanding Tahun 2022 dimana terdapat 18 Provinsi yang melebihi rata-rata angka nasional. Selain itu masih terdapat ketimpangan nilai antar provinsi khususnya kelompok Provinsi di Pulau Jawa dengan kelompok Provinsi lainnya.
- **Jabar berada pada skor 3,76 berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,44.** Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Jabar sudah lebih baik dari rata-rata nasional namun tetap dapat ditingkatkan, khususnya dalam aspek inovasi, infrastruktur, dan kualitas SDM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif.



PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



Indeks ±Rp10.000,-/pax

Sasaran pemenuhan gizi:

- Peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA (umum, kejuruan, keagamaan, khusus, layanan khusus, dan pesantren): 6 hari/minggu (Senin-Sabtu)
- Anak < 5 tahun : 7 hari/minggu
- Ibu hamil dan ibu menyusui : 7 hari/minggu



PEMBERITAAN TERKAIT KABUPATEN SUMEDANG

SB Sumedang Bagus

Panen Raya Serentak Dipimpin Presiden Prabowo, Bupati Sumedang Tegaskan Komitmen Swasembada Pangan - Sumedang Bagus

SUMEDANG BAGUS - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengikuti kegiatan Panen Raya Padi Serentak yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik...

6 days ago

RS Radar Sumedang

Kemiskinan di Sumedang Menurun, Tapi Masih 9,01 Persen

RADARSUMEDANG.id, KOTA – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Sumedang mengalami...

3 weeks ago

MI Media Indonesia

Sumedang Berhasil Turunkan Angka Stunting dari 27,6% Menjadi 14,4%

Sumedang Berhasil Turunkan Angka Stunting dari 27,6% Menjadi 14,4% · Dari Globalisasi ke Arah Deglobalisasi Pasca-Trump Tariff. 07/4/2025 05:00...

13 Jan 2025

T Tribunpriangan.com

Jelang Subuh Tadi Gempa Terkini di Jawa Barat Guncang Sumedang, BMKG Tunjukkan Pusat Gempa di Darat

BMKG menunjukkan pusat gempa berada di darat, 15 Km Tenggara Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

1 day ago

RS Radar Sumedang

Jalan Tolengas-Jatigede Kembali Diperbaiki, Pemkab Sumedang Fokus Infrastruktur dan Bantuan Sosial

Tahun ini, perbaikan jalan yang menjadi akses utama menuju kawasan Wisata Jatigede dari arah timur Sumedang dilakukan di wilayah Desa Marongge-...

3 weeks ago

SB Sumedang Bagus

Sumedang Menuju Kota Cerdas, Bupati Dony Teken Kesepakatan Smart Pole dengan PT Alita - Sumedang Bagus

Bupati Dony Ahmad Munir melakukan dua penandatanganan kesepakatan dengan PT. Alita Praya Mitra di Ruang Kerja Bupati, Jumat (14/3/2025).

1 month ago



VI. SARAN DAN TINDAK LANJUT



- 1. Musrenbang RKPD 2026 harus menjadi titik awal penyelarasan dengan RPJPN 2025–2045.** Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan menjadikan Musrenbang RKPD tahun ini sebagai momen strategis untuk memastikan arah kebijakan dan program daerah sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
- 2. Tingkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan.** Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis untuk menyinergikan kebijakan dan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Seluruh perangkat daerah perlu aktif berkontribusi secara substantif.
- 3. Dorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah.** Sumedang memiliki potensi strategis di berbagai bidang. RKPD 2026 harus mampu menangkap potensi ini dalam bentuk program prioritas yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan.
- 4. Pastikan RKPD 2026 secara nyata mendukung dan berkontribusi terhadap 83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN dan Proyek-Proyek Strategis Nasional**
- 5. Siapkan program yang memberikan ruang kemudahan berusaha** melalui kebijakan yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi
- 6. Fokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan public,** tidak berdasarkan pemerataan antar OPD, atau alokasi anggaran sebelumnya
- 7. Pastikan setiap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat**



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id